



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
SUB UNIT KERJA : BIDANG KEPEMUDAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PETRUS BONO LISTIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN**
3. NHK : **224504**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 750.600.000**

1. Tanah Seluas 200 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 50.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/80 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 119.020.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp. 520.000
2. MOBIL, DAIHATSU HIJET MINIBUS Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 9.823.370****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---**



Sub Total	Rp.	879.443.370
III. HUTANG	Rp.	351.369.874
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	528.073.496

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **30 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.